

EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR BANDANG

Yolanda Pratami Putri^{1b}, Zikri Alhadi¹

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^byolandapratami2201@gmail.com

Abstract

This research was conducted to see the effectiveness of the role of the Nagari Binjai Tapan Government in preventing banjir bandang disasters. Based on the problems and objectives, the researchers used qualitative techniques and descriptive methods as well as purposive sampling techniques for selecting informants. The data were collected using the method of observation, interviews and documentation studies. Based on the results and discussion, it shows that the effectiveness of the Nagari government's role in the effort to prevent banjir bandang disasters as a whole is divided into three criteria, namely goal achievement, integration/socialization and adaptation. These three elements can be said to have not gone well, the first is that the achievement of goals has not been carried out in accordance with what is desired. Next, integration has been carried out but has not been fully effective and adaptation has not been carried out properly due to lack of budget funds to repair the damage that occurred after the banjir bandang. The role of the nagari government has 4 indicators, namely providing guidelines for the community to carry out prevention, then carry out prevention and evacuation of the community as well as carry out disaster mitigation and disaster emergency response these four indicators have not been fully effective.

Keywords: *Role Effectiveness, Role of Nagari Government, Flash Flood*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas peran Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam upaya pencegahan bencana banjir bandang. Berdasarkan permasalahan dan tujuannya maka peneliti memakai teknik kualitatif dan metode deskriptif serta teknik *purposive sampling* untuk pemilihan informan. Datanya dikumpulkan dengan metode pengamatan/observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan menunjukkan bahwasanya Efektivitas Peran pemerintah nagari dalam upaya pencegahan bencana banjir bandang secara keseluruhan dibagi menjadi tiga kriteria yakni pencapaian tujuan, integrasi/sosialisasi serta adaptasi. Tiga unsur ini bisa dikatakan belum berjalan dengan baik yang pertama yaitu pencapaian tujuan belum terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan selanjutnya untuk integrasi sudah dilakukan namun belum sepenuhnya efektif dan adaptasi masih belum terlaksana dengan baik karena kurangnya anggaran dana untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pasca banjir bandang. Peran pemerintah nagari ada 4 indikator yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat melakukan pencegahan selanjutnya melakukan pencegahan dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat serta melakukan mitigasi bencana dan tanggap darurat bencana keempat indikator ini belum sepenuhnya efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas Peran, Peran Pemerintah Nagari, Banjir Bandang*



Pendahuluan

UU No. 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana menjelaskan bahwasanya bencana merupakan serangkaian kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam yang sifatnya mengancam dan mengganggu terhadap penghidupan masyarakat sehingga memberikan dampak dapat berupa rusaknya lingkungan sekitar bencana, kemudian kerugian harta benda serta juga berdampak pada psikologis. Sedangkan menurut (Nurjannah, 2011) menyatakan bahwa bencana alam ialah serangkaian kejadian yang disebabkan oleh manusia sehingga mengakibatkan dampak terhadap masyarakat. Salah satu bentuk bencana yang sering terjadi dan mengganggu penghidupan masyarakat yakni banjir bandang.

Marlina (2009: 30) Banjir merupakan suatu peristiwa dimana terbenamnya daratan oleh air hal ini disebabkan karena adanya volume air yang meningkat. banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan pada suatu tempat akibat adanya curah hujan lebat, adanya luapan air sungai atau pecahnya bendungan sungai. Anwar Kuba (2011: 8) Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air yang melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap yang menggenangi daratan yang lebih rendah disekitarnya. Banjir adalah situasi dimana suatu daerah sedang digenangi air dalam jumlah yang begitu besar.

Banjir bandang ialah peristiwa terendamnya suatu wilayah yang terjadi akibat meluapnya keluar alur sungai dikarenakan debit sungai yang secara mendadak membesar dan melebihi muatan aliran. Banjir bandang berlangsung secara cepat dan biasanya dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) jam dan melanda area disekitarnya dengan kecepatan aliran yang sangat besar serta memicu terjadinya longsor lereng dan tebing (Utomo, 2012).

Banjir bandang adalah salah satu jenis bencana dengan dampak yang besar terhadap penghidupan masyarakat sehingga hal tersebut harus diwaspadai oleh masyarakat. Banjir bandang merupakan bencana yang secara tiba-tiba datang dikarenakan hujan deras dalam jangka waktu lama serta menyusutnya juga cepat sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat di hilir sungai. Kesiagaan masyarakat dalam menyambangi bencana banjir bandang sangat diperlukan, untuk sosialisasi/integrasi kepada masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan. UNESCO (2006) dalam (Utomo, 2012) menyatakan bahwasanya banjir bandang membawa pengaruh yang negatif bagi masyarakat diantaranya dampak fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

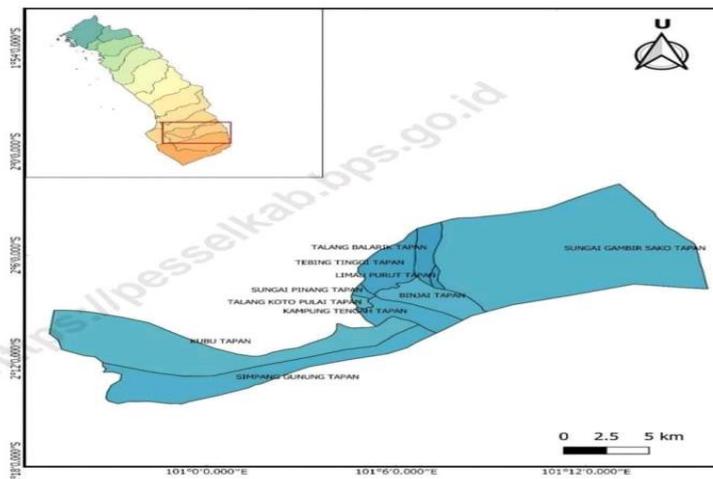
Nagari Binjai Tapan adalah salah satu Nagari yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang sangat berpotensi akan terkena banjir bandang. Hal ini juga didukung dengan topografi Nagari Tapan yang berada pada daerah pinggir pantai yang landai yang terletak antara bukit barisan dan pantai sehingga landaian itu cepat sekali sampai. Berikut merupakan gambaran peta wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Banjir bandang di nagari binjai tapan sudah sering terjadi, sepanjang tahun 2021 banjir tersebut sudah beberapa kali terjadi Pada akhir Maret lalu banjir bandang menghantam Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Rumah warga maupun lahan pertanian terendam sampai dua meter, Air bah datang tiba-tiba ini bersama balok-balok kayu besar yang menghantam rumah-rumah warga.

Topografi Pesisir Selatan termasuk Tapan merupakan daerah pinggir pantai yang landai. Letak antara Bukit Barisan dengan pantai tidak berapa jauh, jadi landaian itu cepat sekali sampai. Upaya pencegahan banjir adalah dengan pemulihan kembali hutan gundul dan tindakan struktural pemasangan Bronjong atau terasering. Factor penyebab banjir yaitu karena curah hujan tinggi, pendangkalan sungai hingga kebiasaan buang sampah sembarangan. Berikut Peta Nagari yang berpotensi bencana :



PETA WILAYAH KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Sepanjang tahun 2021 bencana banjir bandang sudah beberapa kali terjadi di Nagari Binjai Tapan, dampak dari bencana tersebut mengakibatkan sebanyak 1.131 rumah terendam, merusak 60 hektar lahan pertanian, merusak 44 hektar lahan palawija dan lahan jagung siap panen, membuat jembatan putus serta merusak jaringan pipa PDAM sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih (Data BPBD Pesisir Selatan.2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka dalam menghadapi/menanggulangi masalah tersebut diperlukan peran aktif berbagai kelompok/institusi yang berwenang terkait hal tersebut, mengingat fakta jumlah korban yang terdampak serta kerugian materi yang dapat dikatakan tidak sedikit pada saat terjadinya bencana. Dalam hal ini sangat diperlukan peran pemerintah terutama pemerintah nagari selaku pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berwenang dalam hal melindungi masyarakat agar dapat memberikan pengarahan terkait pencegahan dan penanganan bencana secara tepat.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai teknik kualitatif dan metode deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Nagari Binjai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun sebab peneliti memilih Nagari Binjai Tapan sebagai tempat penelitian karena nagari tersebut sering terjadinya bencana banjir bandang, tahun 2021 ada beberapa kali terjadi dan terparah pada bulan Maret 2021. Untuk memperoleh hasil penelitian, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Dan untuk pengumpulan informasi/data maka peneliti menggunakan metode wawancara, pengamatan serta dokumentasi. Selanjutnya guna menguji kebenaran data/informasi yang didapat, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Serta untuk teknik menganalisis data, peneliti menggunakan cara menganalisis, mendeskripsikan serta menyimpulkan.



Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Peran Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam pencegahan bencana banjir bandang

1.1 Efektivitas Peran Pemerintah Nagari Binjai Tapan

Peneliti menggunakan teori ukuran efektivitas menurut (Richard M Steers) yang terdiri dari:

a. Pencapaian Tujuan,

ukuran efektivitas pencapaian tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam pencegahan bencana banjir bandang. Berdasarkan data dan wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa dinagari binjai tapan pemerintah nagari bekerja sama dengan pihak BPBD untuk memasang beronjong yang berfungsi sebagai penaaahan air sungai, dengan beronjong tersebut dapat meminimalisir terjadinya banjir bandang dinagari binjai tapan, sayangnya beronjong tersebut tidak bisa bertahan lama karena dapat terkikis oleh sungai batang tapan.

b. Integrasi,

untuk melihat sejauh mana sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. berdasarkan wawancara dan pengamatan yang didapat dilapangan diketahui bahwa integrasi atau sosialisasi di Nagari Binjai Tapan pemerintah nagari bekerja sama dengan pihak BPBD belum terlaksana dengan baik hal itu disebabkan karea kurangnya relawan kebencanaan sehingga dari pihak BPBD sendiri mengalami kesulitan dalam memberikan sosialisasi sementara pemerintah nagari sendiri hanya mampu melakukan sosialisasi dengan alat seadanya karena untuk pemerintah nagari sendiri sama sekali tidak memiliki alat dalam penanganan bencana banjir bandang yang terjadi dinagari binjai tapan.

c. Adaptasi,

untuk melihat sejauh mana program dijalankan. Berdasarkan penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa adaptasi dalam upaya pembangunan di Nagari Binjai Tapan belum terlaksana dengan baik hal itu disebabkan karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah maka dari itu pemerintah hanya mampu menjalankan sesuai dengan tugasnya dikarenakan kewenangan dari pemerintah nagari terbatas.

efektivitas peran pemerintah nagari bahwa untuk pencapaian tujuan dinagari binjai tapan pemerintah nagari bekerja sama dengan pihak BPBD untuk memasang beronjong yang berfungsi sebagai penaaahan air sungai, dengan beronjong tersebut dapat meminimalisir terjadinya banjir bandang dinagari binjai tapan, sayangnya beronjong tersebut tidak bisa bertahan lama karena dapat terkikis oleh sungai batang tapan. selanjutnya Berdasarkan peran pemerintah nagari bahwa untuk integrasi atau sosialisasi dinagari binjai tapan pemerintah nagari bekerja sama dengan pihak BPBD belum terlaksana dengan baik hal itu disebabkan karena kurangnya relawan kebencanaan sehingga dari pihak BPBD sendiri mengalami kesulitan dalam memberikan sosialisasi sementara pemerintah nagari sendiri hanya mampu melakukan sosialisasi dengan alat seadanya karena untuk pemerintah nagari sendiri sama sekali tidak memiliki alat dalam penanganan bencana banjir bandang yang terjadi dinagari binjai tapan.

Selanjutnya peran pemerintah dalam melakukan adaptasi dalam upaya pembangunan dinagari binjai tapan belum terlaksana dengan baik hal itu disebabkan karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah maka dari itu pemerintah hanya mampu menjalnkan sesuai dengan tugasnya dikarenakan kewenangan dari pemerintah nagari terbatas.



1.2 Peran Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam pencegahan bencana banjir bandang

Menurut Raho dalam (Alhadi, 2018) menyatakan peran ialah suatu bentuk sikap yang diinginkan masyarakat dari seseorang/kelompok yang mempunyai kewenangan tertentu ditengah masyarakat. Peran merupakan suatu aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi.

Peran Pemerintah Nagari Binjai Tapan berpedoman pada UU No. 24 Tahun 2007 meliputi: Memberikan pedoman dan pengarahan kepada masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana Banjir Bandang.

a. Memberikan peringatan

Peran pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap siaga bencana jika terjadinya hujan deras tidak berhenti kurang lebih 3 sampai 5 jam maka dapat dipastikan akan terjadinya banjir. Selain itu peran dari pemerintah nagari untuk memperbaiki dan meminimalisir bencana banjir bandang di Nagari Binjai Tapan maka langkah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Nagari yaitu dengan memasang beronjong berupa beton yang berfungsi sebagai penahan erosi tanah sepanjang tepi sungai batang tapan. Untuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah efektif karena sosialisasi tersebut sudah sering dilakukan kepada masyarakat sebelum terjadinya bencana.

b. Melakukan pencegahan

Peran yang kedua dalam upaya penanggulangan bencana yaitu dengan cara melakukan pencegahan agar bencana tersebut tidak terulang kembali, pecegahan yang dilakukan yaitu: a) melarang keras adanya penebangan hutan secara liar karena jika hal tersebut terus dilakukan maka bencana akan terus terjadi secara terus menerus; b) melarang membuang sampah ke sungai karena jika hal tersebut sering dilakukan maka sungai batang tapan akan meluap dan akan mengakibatkan banjirmelakukan penanaman pohon kembali hall ini bermanfaat untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Pencegahan bencana yang dilakukan di Nagari Binjai Tapan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, namun pihak pemerintah nagari dibantu dengan BPBD tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak merusak lingkungan serta tidak melakukan pembangunan di daerah tepi sungai sehingga pada saat terjadi banjir bandang dapat memperkecil resiko terjadinya kerusakan baik pada rumah warga maupun pada lingkungan sekitarnya.

c. Melakukan evakuasi

Peran yang ketiga yaitu melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar wilayah banjir, Pemerintah nagari bekerja sama dengan BPBD yaitu dengan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah banjir untuk di amankan ke posko pengungsian yang telah di sediakan oleh pihak BPBD sebelum terjadinya banjir bandang tersebut dan juga pemerintah nagari dan juga BPBD menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang supaya tidak menimbulkan kepanikan.

d. Mitigasi bencana dan tanggap darurat bencana,

Dalam melakukan mitigasi bencana pemerintah nagari melakukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, usaha yang dilakukan untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana yaitu pihak pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah nagari untuk menormalisasi sungai batang tapan sebagai upaya penanggulangan bencana banjir. Adapun bentuk dari mitigasinya yaitu memasang brojong, memasang tanggul sungai untuk meminimalisir resiko terjadinya bencana.



Peran pemerintah nagari dalam penanganan banjir bandang dinagari binjai tapan mendukung system Tanggap Darurat baik dalam bidang manajerial maupun teknis. Membentuk tim respon awal untuk mendukung pelaksanaan operasi darurat di agari binjai tapan.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa efektivitas peran pemerintah nagari dalam upaya pencegahan bencana banjir bandang di Nagari Binjai Tapan pada saat menghadapi banjir bandang dikategorikan dalam tiga indikator menurut (Richard M. Steers) yang terdiri dari a) pencapaian tujuan; b) Integrasi/sosialisasi dan c) Adaptasi/penyesuaian. Sedangkan untuk peran Pemerintah Nagari Binjai Tapan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana terdiri dari: a) memberikan pedoman dan pengarahan, b) melakukan pencegahan, c) melakukan evakuasi masyarakat, d) mitigasi bencana dan tanggap darurat bencana. Dari empat peran tersebut pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik namun dari setiap indikator masih belum maksimal hasil yang dicapai. Efektivitas pemerintah nagari binjai tapan dalam menghadapi bencana banjir bandang yang terjadi belum sepenuhnya efektif.

Daftar Pustaka

- Alhadi, Z. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kelompok Siaga Bencana Untuk Mewujudkan Kesiapsiagaan Masyarakat di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 1*.
- Ali, M. (2019). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 Nomor 2 September 2019*.
- Keban, Y. (2008). *6 dimensi strategis admi publik konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: gava media.
- Kuba, Anwar. 2011. *Rangkuman Kuliah Manajemen Bencana*. Rangkuman Kuliah. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar.
- Marlina, Lina. Dkk. 2011. *Buku Pintar Bencana Alam*. Jakarta: Harmoni.
- Nawawi, Z. (2015). *Manajemen Pemerintah edisi pertama*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Nurjannah. (2011). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Utomo, M. d. (2012). *Petunjuk Tindakan dan Sistem pencegahan Banjir Bandang*. Semarang: JICA.